

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA BADAN ~~/DINAS/KECAMATAN~~ PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ~~tentang Rencana~~ Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja ~~Pemerintah Daerah~~ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah... Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

(Lembaran...

4. ~~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);~~
- 5.4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);~~
- 7.5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 8.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. ~~Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);~~
10. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);~~
11. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);~~
- 12.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);~~
- 14.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Formatted: Indent: Left: 0.88 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Left: 0.88 cm, No bullets or numbering

Commented [fh1]: SESUAIKAN DENGAN DINAS

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- ~~15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);~~
- ~~16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);~~
- ~~17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);~~

Formatted: Indent: Left: 0.88 cm, No bullets or numbering

- ~~18-9.~~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

Commented [fh2]: SESUAIKAN DENGAN DINAS

Formatted: Indonesian

- ~~19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;~~

Formatted: Indent: Left: 0.88 cm, No bullets or numbering

- ~~20-10.~~ Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);

- ~~21-11.~~ Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

~~22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);~~

Formatted: Indent: Left: 0.88 cm, No bullets or numbering

~~23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 198);~~

Formatted: No bullets or numbering

~~24.12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 204);~~

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

~~13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 206);~~

Formatted: Swedish (Sweden)

~~25.14. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 27);~~

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/DINAS/KECAMATAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Formatted: Portuguese (Brazil)

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah ~~kepala daerah~~ Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- ~~5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.~~
- ~~6.5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.~~
- ~~7.6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.~~
- ~~8.7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya..~~
- ~~9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.~~
- ~~10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.~~
- ~~11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.~~
- ~~12.8. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.~~
- ~~13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.~~
- ~~14.9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang di peroleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.~~
- ~~15. Startegi adalah langkah berisikan program program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.~~
- ~~16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis~~

Commented [fh3]: Yang ada rencana kerja perangkat daerah

Commented [fh4]: Disesuaikan dengan ketentuan umum Permendagri 86 Tahun 2017

Formatted: Indonesian

- ~~Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.~~
- ~~17.10.~~ Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk Upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- ~~18.11.~~ Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya Pembangunan.
- ~~19.~~ Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran-keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- ~~20.~~ Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil Pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Formatted: Indent: Left: 1.07 cm, No bullets or numbering

BAB II
RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH/DINAS/KECAMATAN
TAHUN 2026

Formatted: Default, Indent: Left: 1.07 cm

Formatted: Font: Not Bold

Pasal 2

Commented [fh5]: Disesuaikan dengan Pasal 2 Permendagri 12 Tahun 2024

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD;
- (1) Renja Badan/Dinas/Kecamatan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra Badan/Dinas/Kecamatan serta dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Renja Badan/Dinas/Kecamatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- (5)(3) Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah /Dinas/Kecamatan Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States)

Commented [fh6]: Dijabarkan dalam 4

Pasal 3

- ~~Maksud Renja Badan/Dinas/Kecamatan Tahun 2026 adalah:~~
- ~~sebagai dokumen perencanaan bagi Badan/Dinas/Kecamatan untuk kurun waktu 2026 yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD; dan~~
 - ~~sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.~~
- (1) ~~Tujuan ditetapkan Renja Badan/Dinas/Kecamatan Tahun 2026 adalah :~~
- ~~sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;~~
 - ~~menjadi pedoman bagi Badan/Dinas/Kecamatan dalam menyusun RKA Tahun 2026; dan~~
 - ~~menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.~~

Formatted: Left

Pasal 4

- (1) Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah /Dinas/Kecamatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
- pendahuluan;
 - hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - penutup.
- (2) Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah /Dinas/Kecamatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Commented [fh7]: Pasal 129 Permendagri 86 Tahun 2017

BAB III
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Commented [fh8]: Pasal 292 Permendagri 86 Tahun 2017

- (2) ~~Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:~~
 - ~~c. kebijakan perencanaan Renja;~~
 - ~~d. pelaksanaan Renja; dan~~
 - ~~e. hasil capaian Renja.~~
- (6) ~~Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda secara berkala.~~
- (7)(2) ~~Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- (8) ~~Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:~~
 - ~~a. Program dan/atau kegiatan dan/ atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;~~
 - ~~b. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;~~
 - ~~c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah; dan~~
 - ~~d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).~~
- (9) ~~Hasil Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.~~

Commented [fh9]:

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

BAB IV
PENUTUP

Formatted: Portuguese (Brazil)

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal ...

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal ...

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

MACHIAVELLI [HERMAN TARMIZIHT](#)

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ... NOMOR ...

DRAFT